

PENGARUH DEKLARASI GANJURAN TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI BAMBANGLIPURO BANTUL 1990-1997

Oleh :
M Ibrahim Bayu Pratama
(12407144030)

Abstrak

Pada awal masa pemerintahan Soeharto, pemerintah menyadari pentingnya ketersediaan pangan, untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Untuk menjaga ketersediaan pangan maka pemerintahan Orde Baru mencanangkan program Revolusi Hijau. Revolusi Hijau mendorong percepatan produksi pangan dan peningkatan jumlah pangan dengan mengubah teknologi pertanian. Dampak negatif mulai muncul pada akhir pelaksanaan program ini. Berkurangnya unsur hara dalam tanah, rusaknya lingkungan serta hilangnya kemandirian petani. Petani Bambanglipuro mulai merasakan dampak dari program ini. Gereja Ganjuran mengadakan seminar tani guna membahas dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seminar tani ini kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Ganjuran. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses lahirnya Deklarasi Ganjuran, pelaksanaannya, dan dampaknya bagi petani di Bambanglipuro Bantul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya Deklarasi Ganjuran merupakan bentuk kepedulian Gereja Katolik terhadap kaum tani yang haknya dirampas oleh pemerintah melalui program Revolusi Hijau. Deklarasi Ganjuran merupakan hasil dari pelaksanaan AISA V yang diselenggarakan di Gereja Ganjuran sebagai perwujudan misi gereja Asia sebagai Gereja Kaum Miskin/Tani. Pelaksanaan program Deklarasi Ganjuran dilakukan oleh LSM SPTN-HPS. SPTN-HPS bertugas membina kelompok tani dan memberikan penyuluhan tentang teknis pertanian organik. Dengan adanya pertanian lestari ala Deklarasi Ganjuran memberikan dampak positif terhadap kehidupan petani di Bambanglipuro, yaitu timbulnya kesadaran petani akan pentingnya menjaga ekologi, serta menggunakan pertanian organik yang lebih murah dan baik untuk lingkungan. Pertanian lestari yang secara ekonomis sangat terjangkau oleh petani Bambanglipuro, dengan harga produk hasil pertanian organik yang secara harga lebih mahal, sehingga pertanian lestari menjadi solusi alternatif bagi petani untuk memenuhi subsistensinya.

Kata Kunci: *Deklarasi Ganjuran, Petani, Bambanglipuro.*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan program Revolusi Hijau di Bambanglipuro dimulai pada tahun 1964 kemudian dilanjutkan kembali dalam pelaksanaan Bimas Nasional pada tahun 1970. Pemerintah pusat meluncurkan program intensifikasi yang dikenal dengan nama Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal).

Bimas adalah bimbingan yang diberikan kepada petani dengan menyediakan kredit produksi di dalamnya, sedangkan Inmas adalah program intensifikasi padi yang dilaksanakan atas dasar swadaya dengan metode *Panca Usaha Tani*, modal dan alat berasal dari perseorangan. Bimas dan Inmas bertujuan agar petani ikut serta secara aktif dalam meningkatkan produksi pangan terutama padi. Pengembangan sarana di tingkat desa seperti Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), BRI-Unit Desa, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), dan Kelompok-kelompok Tani mulai dilakukan sejak adanya program Bimas. Para petani di Bambanglipuro diwajibkan mengikuti Bimas dari penyuluh untuk diberikan penyuluhan tentang metode atau cara meningkatkan produksi padi melalui penyuluhan Bimas seperti pembinaan usaha tani dan mekanisasi pertanian seperti penggunaan bibit unggul, pupuk buatan, pestisida, traktor dan alat penggilingan padi (*huller*).¹

Kelompok-kelompok ini diharapkan mampu mempercepat timbulnya kemauan dan kesadaran petani untuk meningkatkan produksi sehingga bukan lagi merupakan suatu keharusan dan kebutuhan pemerintah, tetapi telah menjadi keharusan dan kebutuhan masing-masing individu. Pada awal pelaksanaan Bimas atau bimbingan masal tersebut sangat sulit dilaksanakan dan kurang efektif. Hal ini dikarenakan para petani memiliki kesibukan lain disamping bekerja disawahnya, meskipun Kepala Desa dengan giatnya melakukan penyuluhan.

Pada umumnya modernisasi pertanian di Bambanglipuro menimbulkan dua pendapat yaitu menerima dan menolak. Bagi sebagian masyarakat menolak

¹Surat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor 464/Um/HKTI/I/9.1976, Perihal: minta laporan alat-alat mekanisasi pertanian.

modernisasi pertanian tersebut mereka adalah yang masih berpegang teguh pada adat dan pola pertanian tradisional alasan mereka jika mereka meninggalkan adat atau tradisi mereka tidak ingin dianggap sebagai orang yang melupakan tradisi pertanian. Namun dalam penolakannya masyarakat tani hanya bisa pasrah dan tidak ada perlawanan terhadap pemerintah.²

Penerapan kebijakan Revolusi Hijau oleh pemerintah Orde Baru sama halnya dengan pemaksaan terhadap kaum tani, kebebasan petani direbut secara paksa. Penerapan kebijakan ini sama halnya dengan tanam paksa di abad modern. Pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau dengan pengenalan teknologi pertanian dengan diadakanya penyuluhan dan sosialisasi ke desa-desa menggunakan aparat militer sebagai bentuk ancaman verbal terhadap petani. Penyuluhan yang diadakan oleh pihak desa dengan kelompok tani selalu dihadiri aparat militer atau TNI sebagai pengawas rapat.³

Penggunaan pupuk kimia yang berlebih guna memepercepat pertumbuhan padi dan menghilangkan hama pada sawah, menimbulkan masalah baru bagi petani. Alam mempunyai suatu *ekosistem* atau rantai makanan yang berkaitan satu dan lainnya. Fungsi dari rantai makanan ini adalah untuk mengontrol populasi satu dengan lainnya. Begitu juga sawah, dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebih untuk membunuh hama sawah, tidak hanya hama yang terbunuh melainkan juga *predator* hama tersebut.

Hal ini membahayakan sawah itu sendiri, dengan hilangnya salah satu komponen dari rantai makanan maka akan ada populasi hewan yang tidak terkontrol. Dalam hal ini sekitar tahun 1989 hama padi seperti wereng tidak dapat terkontrol dan memnyebabkan panen petani berkurang.

² Sajogyo, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982), hlm.45.

³ Wakijo, wawancara di Sumbermulyo pada 24 Mei 2015 .

B. BAMBANGLIPURO DAN LATARBELAKANG MUNCULNYA DEKLARASI GANJURAN

Tanah bagi penduduk pedesaan merupakan aset yang sangat penting. Kepemilikan tanah, bentuk rumah, serta faktor keturunan di pedesaan dapat dijadikan sebagai ukuran status sosial seseorang secara tradisional. Tanah menduduki faktor penting dalam kehidupan agraris, karena hanya dengan tanahlah terjadi kelangsungan hidup. Lazimnya dalam kehidupan feodal tanah menumbuhkan kekayaan dan kekuasaan. Dari sinilah mengapa tanah menjadi aset penting dalam kehidupan agraris. Siapa menguasai tanah luas maka menguasai faktor-faktor produksi lain yang menciptakan kekayaan dan kekuasaan.⁴

Menurut Ina Slamet, para penduduk pedesaan Yogyakarta, menggolongkan diri mereka sendiri atas pemilikan tanah terdiri atas golongan petani *kuli kenceng* yaitu seseorang yang memiliki sawah, tegal dan pekarangan. Kemudian golongan petani setengah *kenceng* yaitu seseorang yang hanya memiliki tegal dan pekarangan. Selanjutnya, petani *gundul* adalah petani yang hanya memiliki tegal saja sedangkan petani *magersari* adalah petani yang hanya memiliki rumah dan rumah itu didirikan di atas pekarangan orang lain. Adapun *standard* penentu starta dalam masyarakat desa tersebut didasarkan pada ukuran bersawah, berkebun dan memiliki rumah untuk *kuli kenceng*. Makin menurun jenis hak miliknya makin rendah kedudukan orang di stratifikasi sosial desa.⁵ Petani tidak lagi digolongkan menjadi empat kelompok seperti di atas, tetapi digolongkan menjadi tiga dengan tidak ada penyebutan *kuli*. Penggolongan tiga itu antara lain, petani pemilik tanah, petani penggarap dan buruh tani. Petani pemilik tanah diperuntukkan bagi mereka yang dulu disebut *kuli kenceng* dan *kuli gundul*. Petani penggarap untuk menyebut seorang petani tak bertanah yang bermata-pencarian sebagai penyewa atau penggarap, sedangkan buruh tani

⁴Suhartono W. Pranoto, *Serpihan Budaya Feodal*, (Yogyakarta: Agasty Media, 2001), hlm.89.

⁵ Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Penguasaan Pola Tanah Di Jawa Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 318.

diperuntukkan bagi petani yang tak bertanah yang bermata-pencaharian sebagai buruh tani.

Teknologi modern yang muncul dalam bidang pertanian tidak langsung dapat diterima oleh masyarakat tani di Bambanglipuro. Penerapan teknologi pertanian dan kemajuan sistem bercocok tanam membutuhkan penanganan secara khusus dan lebih rumit, karena pertanian semakin banyak menggunakan alat-alat dan sarana yang membutuhkan adanya keterampilan khusus diantara para petani.⁶ Menurut hasil wawancara dengan bapak Prawiroharjo bahwa penerapan teknologi Revolusi Hijau hanya bisa digunakan oleh Insinyur saja, karena para petani Bambanglipuro kebanyakan hanya berpendidikan rendah, membutuhkan waktu lama untuk bisa diterapkan menyeluruh.⁷ Dengan demikian penggunaan teknologi pertanian modern sedikit mengalami hambatan.

Pada umumnya modernisasi pertanian di Bambanglipuro menimbulkan dua pendapat yaitu menerima dan menolak. Bagi sebagian masyarakat menolak modernisasi pertanian tersebut mereka adalah yang masih berpegang teguh pada adat dan pola pertanian tradisional alasan mereka jika mereka meninggalkan adat atau tradisi mereka tidak ingin dianggap sebagai orang yang melupakan tradisi pertanian. Namun dalam penolakannya masyarakat tani hanya bisa pasrah dan tidak ada perlawanan terhadap pemerintah.⁸

Penerapan kebijakan Revolusi Hijau oleh pemerintah Orde Baru sama halnya dengan pemaksaan terhadap kaum tani, kebebasan petani direbut secara paksa. Penerapan kebijakan ini sama halnya dengan tanam paksa di abad modern. Pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau dengan pengenalan teknologi pertanian dengan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi ke desa-desa menggunakan aparat militer sebagai bentuk ancaman verbal terhadap petani. Penyuluhan yang diadakan oleh pihak desa dengan kelompok tani selalu dihadiri

⁶ Anonim, "Rendahnya Pendidikan Masyarakat Adopsi Teknologi Baru", dalam *Majalah Krida* (No.48, 1980), hlm. 120.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Prawiroharjo pada 24 Mei 2015

⁸ *Ibid.*, hlm.45.

aparatus militer atau TNI sebagai pengawas rapat.⁹ Menurut penuturan Wakijo yang pada masa pelaksanaan Revolusi Hijau, bekerja sebagai penggarap sawah. Beliau pernah dipanggil oleh kepala desa setempat untuk diberi teguran, panggilan tersebut dikarenakan Wakijo tidak menanam padi tipe IR 16. Menurutnya pada waktu itu jika menanam padi tipe tersebut maka hasil panen tidak bisa menutupi modal. Ketika masa panen datang padi bapak Wakijo sudah dibakar oleh koramil setempat. Menurut penuturan bapak Wakijo jika ada petani yang tidak menanam bibit dan menggunakan pupuk yang dianjurkan oleh pemerintah, maka akan dilakukan tindakan peneguran, dan jika masih tidak mau menggunakan bibit maka ketika musim panen, sawah tersebut akan dibakar.¹⁰

C. DEKLARASI GANJURAN

Mulainya HPS di Paroki Ganjuran, tidak bisa dilepaskan dari Rm. Greorius Utomo. Bertepatan dengan 64 tahun *tumbuk ageng* Paroki Ganjuran tahun 1988. Ketika itu Rm Utomo mulai meneliti kembali sejarah dan semangat gereja. Pencarian dan penelitiannya membawa Rm. Utomo sampai ke Belanda, membaca ulang majalah misi Yesuit *Claverbond*, demi memahami sejarah paroki.¹¹ Dalam penelitiannya Rm. Utomo menemukan bahwa sejarah perkembangan Gereja Ganjuran tidak bisa dilepaskan dari peran Dr. Josef dan Ir. Julius Schmutzer. Mereka adalah pemilik sekaligus pengelola pabrik gula Gondanglipuro. Mereka adalah orang Katolik yang melaksanakan ajaran sosial gereja mengenai asas-asas solidaritas. Ajaran sosial Gereja yang disampaikan oleh Paus Leo XIII tahun 1891 yaitu *Rerum Novarum*¹².

⁹ Wakijo, wawancara di Sumbermulyo pada 24 Mei 2015

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rr.Huub J.W.M. Boelaars, dalam R. Hadawiryana (ed.), *Indonesia: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 415.

¹² *Rerum Novarum* adalah sebuah [ensiklik](#) yang diterbitkan oleh [Paus Leo XIII](#) pada [15 Mei 1891](#). Ini adalah sebuah surat terbuka yang diedarkan kepada semua [uskup](#) yang membahas kondisi kelas pekerja.

Pada bulan Maret 1971 diadakan *Asian Bishops Meeting* (ABM) yang merupakan embrio dari *Federation of Asian Bishops' Conferences* (FABC) atau forum para uskup Asia. Pada pertemuan ini tema yang diangkat adalah ensiklik Paus Paulus VI *Populorum Progressio*: Pembangunan manusia adalah suatu proses mengubah kondisi yang kurang manusiawi menjadi lebih manusiawi.¹³ Selama berlangsungnya ABM, kebutuhan akan suatu organisasi untuk mempersatukan dan menjadi media komunikasi para uskup, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Maka diadakanlah sebuah pertemuan khusus selama berlangsungnya ABM. Pertemuan khusus ini membentuk sebuah panitia untuk menindaklanjuti untuk isu tersebut. Panitia ini diberi mandat khusus untuk mengadakan pertemuan Para Ketua Konferensi Wali Gereja.¹⁴ FABC adalah sebuah asosiasi sukarela Konferensi-konferensi para Wali Gereja di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tengah, yang dibentuk atas persetujuan Takhta Suci (Vatikan). Tujuan untuk membantu memperkembangkan solidaritas dan koresponsibilitas antar para-anggota. Demi kesejahteraan Gereja dan masyarakat Asia, dan memajukan serta membela kebaikan yang lebih besar. Federasi tidak mempunyai daya mengikat secara yuridis: penerimaannya merupakan suatu ungkapan tanggung-jawab kolektif.

Langkah awal yang ditempuh para uskup Asia adalah dengan mengadakan seminar dan pelatihan bagi para uskup. Pada Januari 1979 seminar pertama ini dimulai kegiatan ini di namakan *Bishop's Institute for Social Action* (BISA) meskipun menjadi seminar uskup terbesar di Asia namun pelaksanaannya disponsori oleh Komisi Urusan Teologi (Protestan), Konferensi Kristen Asia dan

¹³ Dewan Karya Pastoral Keuskupan Semarang, *Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 1984-1990*, (Semarang: Keuskupan Agung Semarang, 1984), hlm. 64.

¹⁴History of Federation of Asian Bishop's Conferences, <http://www.fabc.org/about.html>, diakses 20 July 2016, pukul.01.00.

Kantor Pembangunan Manusia (OHD).¹⁵ Tema untuk seminar tersebut adalah Pergumulan Asia untuk Kemanusiaan yang Penuh: Upaya Menemukan Teologi yang Relevan. Meskipun untuk pertama kalinya seminar tentang kemanusiaan ini diadakan di Asia, namun adalah yang ketiga dari rangkaian konferensi-konferensi serupa dalam rangka program lima tahunan Keuskupan Asia. Pelaksanaan AISA di gereja lokal di Asia merupakan bentuk kepedulian FABC kepada masyarakat akar rumput. Umat akar rumput adalah anggota gereja yang paling dekat dan dalam arti tertentu menyatu ditengah masyarakat Asia yang majemuk, sehingga menjadi ujung tombak dinamika gereja di dan kedalam dunia.¹⁶ Penggunaan gereja lokal sebagai tempat pelaksanaan sengaja untuk mengajak umat katolik berpartisipasi aktif dalam gerakan sosial gereja. Paroki sebagai hirarki gereja terendah dijadikan patokan untuk mengukur dinamika kehidupan masyarakat pedesaan Asia. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan AISA ke-5 yang berlangsung tanggal 9-16 Oktober 1990 dan bertempat di Ganjuran, Yogyakarta. Peringatan Hari Pangan Sedunia 1990 dan sekaligus penyelenggaraan AISA V, yang bertemakan “Gereja Asia, Gereja Kaum Tani”.

Acara AISA V dibagi menjadi dua rangkaian acara. Acara pertama diperuntukkan bagi pihak internal gereja yang berupa misa pembukaan/misa syukur pada tanggal 16 Oktober 1990 pukul 17.00 wib. Pada tanggal 17 Oktober, sehari setelahnya dilakukan acara seminar yang dihadiri oleh berbagai perwakilan petani se-Asia, LSM baik nasional dan internasional, dan pihak-pihak yang menaruh perhatian pada pertanian organik.

Pembicara pada seminar tersebut dari pihak LPPS ialah Rm. Utomo, pihak akedemisi diwakili oleh Dr. Loekman Soetrisno dari UGM, dan bapak K.R.T. Suryo Padmo Hadinigrat sebagai kepala daerah Bantul yang pada saat itu

¹⁵ Douglas J.Elwood, dalam Pdt.B.A. Abednego, DPS (ed.), *Teologi Kristen Asia: Tema-tema yang Tampil ke Permukaan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006),.hlm. 35.

¹⁶Mgr. Edmund Woga, CSsR, *Misi Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 315.

mensosialisasikan semangat Projotamansari.¹⁷ Diluar acara seminar diadakan gelar budaya dan pameran HPS serta pasar malam dilapangan depan Gereja Ganjuran. Pameran yang berupa produk pertanian unggulan daerah, produk kerajinan tangan masyarakat Sumbermulyo, produk pertanian organik dan pasar malam/pasar hiburan rakyat yang berlangsung tiga malam.

Pada seminar tersebut disetujui sebuah kesepakatan tentang pembangunan pertanian dan pedesaan lestari. Kesepakatan inilah yang disebut sebagai Deklarasi Ganjuran. Deklarasi Ganjuran berisikan:

Deklarasi Ganjuran¹⁸

- a. Pernyataan:
 1. Kepedulian:
 - a.) Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani.
 - b.) Realtif kesejahteraan petani yang berjasa tertinggal.
 - c.) Petani kehilangan kebebasan bertani sesuai aspirasinya.
 2. Refleksi:
 - a.) Petani sebagai pangkal dan tujuan pembangunan Indonesia.
 - b.) Presiden mengakui pendapat alternatif, keterbukaan, dan *bottom up system*(dari bawah ke atas).
 - c.) Dalam Pancasila ada kesetiakawanan sosial, dan demokrasi.
 - d.) Pembangunan nasional memperhatikan pelestarian alam dalam peningkatan produksi.
 - e.) Tanah, air dan alam anugerah Allah harus dipelihara untuk kesejahteraan umum dan sebagai ungkapan syukur dan cinta sesama.
 3. Himbauan:
 - 1.) Kepada Pemerintah:
 - (a) Agar mendukung dan melindungi prakarsa petani dalam bervisi.
 - ◆ Berwawasan lingkungan
 - ◆ Murah secara ekonomis
 - ◆ Sesuai budaya setempat
 - ◆ Berkeadilan sosial
 - ◆ Dengan pendekatan holistic dan berkelanjutan
 - (b) Agar mendukung dan melindungi prakarsa petani dalam bertani sesuai aspirasi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Romo Gregorius Utomo, Pr., :Deklarasi Ganjuran, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lestari”, Bahan materi Seminar Hari Pangan Sedunia 1990 di Gereja Ganjuran 16 Oktober 1990.

- (c) Agar mendukung dan melindungi prakarsa petani dalam berorganisasi sesuai kebutuhan dan aspirasi petani.
- 2.) Kepada Gereja:
- ◆ Agar lebih menampakan perhatian, keterlibatan, dan kepedulianya kepada nasib petani.
 - ◆ Agar membantu perorangan, lembaga/paguyuban dalam usaha pengembangan dan penelitian pertanian lestari.
 - ◆ Agar membina jaringan petani lestari.
 - ◆ Agar membantu petani dengan media komunikasi/informasi antar peneliti, pendamping petani dan petani.
- 3.) Kepada diri petani:
- ◆ Mulai mengembangkan pertanian lestari ditempat masing-masing.
 - ◆ Membentuk dan mengembangkan wadah serta jaringan kerjasama antara kaum petani.

Deklarasi Ganjuran menyuarakan pelaksanaan, dan penyebarluasan pembangunan pertanian dan pedesaan yang lestari. Penggunaan kata lestari menurut pihak gereja adalah tentang cara pandang atau filosofi hidup, sedangkan organik lebih kepada media saluran dan teknis pertanian. Pembangunan pertanian dan pedesaan yang lestari yaitu berwawasan lingkungan (*ecological sound*), murah secara ekonomis sehingga tergapai oleh segala kalangan masyarakat (*economically feasible*), sesuai dengan kebudayaan setempat (*culturally adapted*), dan berkeadilan sosial (*social just*).

Deklarasi Ganjuran yang merupakan gerakan sosial gereja, pada intinya adalah tentang bagaimana mengembalikan kemandirian petani yang telah direbut penguasa dengan program revolusi hijaunya dan tentang gerakan sadar lingkungan yang pada pelaksanaannya gereja menggunakan media pertanian organik. Penggunaan pertanian organik sebagai media untuk mengembalikan kemandirian petani dan merupakan wujud gerakan nyata Gereja Asia sebagai gereja kaum miskin disebabkan bahwa mayoritas penduduk Asia terutama Asia

Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Dalam pidato pembukaan Deklarasi Ganjuran Rm Utomo berbicara mewakili petani mengatakan¹⁹:

Delapan puluh persen lebih penduduk Indonesia adalah petani. Namun sampai saat ini petani tak banyak yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan pertimbangan itu, para petani memberi himbauan kepada pemerintah untuk lebih mendukung prakarsa-prakarsa kelompok tani. Selain itu, dihimbau juga kepada gereja untuk semakin lebih menampakkan keberpihakanya kepada rakyat miskin, dalam hal ini para petani. Deklarasi juga menandai jaringan kerjasama di antara para petani di tanah air.

D. PENGARUH DEKLARASI GANJURAN

Untuk mewujudkan visi misi Deklarasi Ganjuran yang berupa Pertanian dan Pedesaan yang Lestari maka pada perayaan Hari Pangan Sedunia 1994 bertempat di Boyolali lahirlah Sekretariat Pelayan Tani Nelayan Hari Pangan Sedunia (SPTN-HPS) yang bertugas menjalankan visi dan misi dari Deklarasi Ganjuran. Selain itu dalam masing-masing paroki dibentuk kelompok tani lestari. Kelompok-kelompok tani lestari tersebut didampingi oleh SPTN-HPS.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendampingan, mulai dari penyampaian informasi dan sosialisasi serta pendampingan terhadap petani, SPTN-HPS mengangkat dan mempercayakan sejumlah kader yang berasal dari setiap daerah yang menjadi sasaran kegiatan LSM bersangkutan. Kader-kader ini umumnya disebut sebagai koordinator wilayah. Kehadiran Korwil (koordinator wilayah) sangat membantu SPTN-HPS karena melalui kader-kader ini SPTN-HPS dapat menemukan persoalan pokok yang dihadapi petani dan mengagendakan rencana kegiatan pendampingan bagi kaum taniyang dimaksud.

Pelaksanaan visi dan misi Deklarasi Ganjuran SPTN-HPS di Bambanglipuro bermitra dengan tiga kelompok tani yang berdomisili di sana. Koordinator wilayah (korwil) SPTN-HPS Bambanglipuro pada tahun 1994 ialah Heri Astono Yaiz. Kelompok tani yang menjadi anggota SPTN-HPS di Bambanglipuro yaitu kelompok tani Lumbung Tales, kelompok tani Sampurna CO dan kelompok tani Lestari Kedon.

¹⁹Romo Gregorius Utomo, Pr."Deklarasi Ganjuran, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lestari", Bahan materi *Seminar* (Sragen,21 Oktober 2009).

Secara psikologis para petani merasa senang dengan adanya Deklarasi Ganjuran. Hal ini disebabkan suara ketidaksetujuan petani atas program Revolusi Hijau telah terwakili, selain itu juga petani merasa kebebasan untuk mengolah lahan pertaniannya sendiri mulai dikembalikan. Menanam padi dan palawija dengan sistem tumpang sari maupun Jajar legowo dirasa lebih menguntungkan daripada hanya menanam padi hibrida dari pemerintah. Petani dan pemilik lahan serta penggarap sawah mulai bisa menentukan tanaman jenis apa yang ingin ditanam setelah mendapat binaan dari SPTN-HPS. Kehadiran program pertanian lestari oleh SPTN-HPS dianggap baik oleh petani karena model pertanian lestari sama halnya dengan pertanian tradisional yang digunakan sekian lama oleh petani yang pada akhirnya tergusur oleh program Revolusi Hijau. Sistem pertanian tradisional petani yang melibatkan hubungan sosial antara sesamanya yang terwujud dengan suatu seremonial²⁰ seperti upacara merti desa dan wiwtan. Hal ini sejalan dengan program pertanian lestari yang salah satunya ingin menghidupkan kembali pengetahuan dan kearifan lokal. Pada prinsipnya pertanian lestari adalah membina petani untuk kembali mandiri. Selain itu petani tidak mungkin bisa mandiri jika penggunaan bibit serta pupuk masih bergantung terhadap subsidi pemerintah.

Bambanglipuro setelah diterapkannya pertanian lestari menimbulkan rasa solidaritas yang kuat dan mengurangi kesenjangan antar petani baik kaya maupun miskin. Sebelum adanya pertanian lestari sangat terlihat kesenjangan antara petani kaya dan miskin. Hal ini dikarenakan mahalnya faktor produksi ketika itu. Akibatnya hanya petani kaya dengan modal sendiri yang mampu membeli faktor produksi baru seperti membeli pupuk dan pengadaan bibit. Sebaliknya petani miskin yang tidak mampu membeli karena tidak memiliki modal maka dengan terpaksa berhutang dengan bunga yang cukup tinggi. Peralihan petani ke sistem pertanian lestari mampu mengurangi kesenjangan tersebut. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah dalam pertanian lestari petani diharuskan saling menolong dan bergotongroyong guna memenuhi sarana

²⁰ Erik Wolf, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 90.

produksi seperti pengadaan bibit dan pupuk kompos. Pengadaan bibit tidak bisa dilakukan sendirian karena ketika itu bibit lokal hampir tidak ada karena kurang peminatnya dan tergusur bibit hibrida, solusi saat itu adalah dengan mendatangkan bibit lokal dari Kabupaten Karanganyar. Bibit lokal yang didatangkan dari Karanganyar harus dibudidayakan bersama oleh seluruh anggota kelompok tani. Pengadaan pupuk kompos dan pestisida alami juga mengharuskan semua anggota petani berkerja sama, mulai dari pengangkutan limbah kotoran ternak, pengadaan bekatul, tetes tebu dan lain-lain. Kerjasama ini dilakukan hampir selama satu kali masa tanam padi yaitu tiga bulan. Untuk anggota yang tidak mempunyai salah satu bahan baku pupuk kompos maka bertugas untuk mengolah sedangkan anggota yang mampu dengan modalnya sendiri mencukupi bahan baku tersebut. Maka dapat dilihat bahwa dengan sistem pertanian lestari kesenjangan antara petani kaya dan petani miskin tak lagi terlihat, antara petani kaya dan miskin dapat berkumpul dan saling tolong menolong.

Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru petani Bambanglipuro dianjurkan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi penggunaan pupuk urea, hal ini dikarenakan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Bantuan pupuk yang sebelumnya mencapai empat kwintal dikurangi menjadi tiga kwintal. Pada pengurangan pertama membuat petani khawatir, karena meskipun mahal untuk mendapatkannya tetapi keberlangsungan sawah mereka sangat bergantung pada pupuk urea tersebut.

Harga pupuk urea dipasaran menurut keputusan Menteri Keuangan Indonesia tahun 1998 adalah sebagai berikut: Urea Prill: Rp. 450/kg, Urea Tablet: Rp. 450/kg, SP-36: Rp.675/kg dan ZA: Rp.506,25/kg.²¹ Dengan harga eceran tersebut jika diaplikasikan untuk menanam padi dengan luas lahan 1000 m² maka rata-rata petani mengeluarkan biaya sebesar Rp.112.000, sedangkan rata-rata luas

²¹ Lihat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 207 tahun 1998 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea.

sawah petani Bambanglipuro 0,41 ha.²² Maka biaya yang harus dikeluarkan petani Bambanglipuro sebesar Rp. 448.000 untuk sekali pemupukan padi. Dengan menggunakan pupuk organik petani hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp.240.000 untuk sekali masa tanam. Berdasarkan perhitungan Ir Yuni biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membuat pupuk kompos adalah sebagai berikut.

Bahan: Pupuk kandang:	1000 kg x 20	= Rp 20.000
Sekam:	400 kg x 100	= Rp 40.000
Calsit:	20 kg x 200	= Rp 4.000
Bekatul :	30 kg x 100	= Rp 30.000
Gula Pasir:	0,5 kg x 4000	= Rp 2.000
Em4	1 liter	= Rp 16.000
Stardek	2,5 kg x 10.000	= Rp 25.000
Tenaga: 4 hari kerja x 2 orang x 10.000		= Rp 80.000
Penggunaan Peralatan		= Rp 23.000
Jumlah		= Rp 240.000

Pupuk kompos yang dihasilkan ialah 1.450 kg.

Penggunaan pupuk organik membuat kebutuhan petani akan pupuk menjadi lebih ringan, karena kebutuhan nutrient yang meningkat dapat dipenuhi kebutuhannya dengan pupuk organik. Pupuk organik yang bahan bakunya merupakan hasil dari sampah rumah tangga sangat membantu dan mengurangi pengeluaran petani. Kelompok tani binaan SPTN-HPS tidak terlalu merasakan karena mayoritas mereka telah menggunakan pupuk organik sebelum keluarnya kebijakan tersebut.

Keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani dirasa cukup berhasil. Indikator keberhasilannya adalah bahwa petani organik bisa memenuhi kebutuhan subsitenya lebih lama daripada para petani konvensional. Dimulai dari sistem tanam tradisional seperti tumpang sari dan *jajar legowo* serta

²² Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Kepada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah, hlm. 34-35.

pola tanamnya membuat petani organik mendapatkan pemasukan dari tanaman selain padi. Selain itu juga pemasukan petani organik didapat dari pemanfaatan pupuk kompos. Pemanfaatan pupuk kompos yang murah dan penggunaannya bisa mencapai sekali musim tanam membuat para petani bisa berhemat dan hal ini memberikan opsi petani dalam memanfaatkan uangnya untuk keperluan yang lain seperti membiayai anak mereka sekolah.²³

E. KESIMPULAN

Deklarasi Ganjuran menyuarkan pelaksanaan, dan penyebarluasan pembangunan pertanian dan pedesaan yang lestari. Penggunaan kata lestari menurut pihak gereja adalah tentang cara pandang atau filosofi hidup, sedangkan organik lebih kepada media saluran dan teknis pertanian. Pembangunan pertanian dan pedesaan yang lestari yaitu berwawasan lingkungan (*ecological sound*), murah secara ekonomis sehingga tergapai oleh segala kalangan masyarakat (*economically feasible*), sesuai dengan kebudayaan setempat (*culturally adapted*), dan berkeadilan sosial (*social just*). Pertanian dan pedesaan lestari yang merupakan semangat dari Deklarasi Ganjuran pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk menggunakan sistem pertanian yang peduli alam sekitar (*ecological sound*). Supaya tercapainya keseimbangan ekologi dan lingkungan sehat, dengan mengolah alam secara bijak serta menghindarkan dari eksploitasi alam. Jika poin pertama tercapai maka dampaknya alam akan memberikan keuntungan kepada petani. Sehingga petani dapat menggunakan bahan yang telah disediakan oleh alam seperti benih, pestisida alami dari kumpulan daun-daun kering, pupuk kompos untuk mengolah pertanian yang secara ekonomis lebih murah dari beli di pabrik.

Deklarasi Ganjuran dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Revolusi Hijau. Pertanian tradisional yang menjadi teknis pelaksanaan Deklarasi Ganjuran mulai bisa menghilangkan ketergantungan petani pada pupuk dan bibit subsidi pemerintah. Menggunakan modal sosial sebagai penggerak pertanian berdampak positif bagi petani dengan mulai hilangnya

²³ Ir. Yuni, Wawancara di Sidomulyo, 6 Agustus 2016.

kesenjangan antara petani miskin dan petani kaya. Pertanian lestari menjadi solusi alternatif petani Bambanglipuro untuk menambah dan mencukupi subsistensinya. Pada perkembangannya Deklarasi Ganjuran dapat mengembalikan kemandirian petani, menyelamatkan bibit lokal dari kepunahan, menghidupkan kembali tradisi pertanian tradisional dengan menggunakan pranotomongso sebagai acuan masa tanam serta masa panen. Pada akhirnya Deklarasi Ganjuran menjadi semangat inti setiap pelaksanaan perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diadakan oleh Gereja Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Surat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor 464/Um/HKTI/I/9.1976,
Perihal: minta laporan alat-alat mekanisasi pertanian.

Buku-buku dan artikel:

Achmad Suyana, "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional". Makalah, disampaikan pada Seminar Sistem Pertanian Berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional pada 15 Februari 2005 di UNS Surakarta.

Dewan Karya Pastoral Keuskupan Semarang, *Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 1984-1990*, Semarang: Keuskupan Agung Semarang, 1984

Douglas J. Elwood, dalam Pdt. B. A. Abednego, DPS (ed.), *Teologi Kristen Asia: Tema-tema yang Tampil ke Permukaan*, Jakarta: Gunung Mulia, 2006

Wolf, Eric, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. (Jakarta: CV Rajawali, 1983

Farhan MH, *Ayo Mengenal Lebih Dekat Biografi Tentang "Jend. H.M. Soeharto"*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2009

Francis Wahono, *Manajemen dan Praktek Gerakan Sosial Baru: Sepenggal Kisah Cindelaras Paritrana: Berpikir dengan Dunia, Berjalan Bersama Rakyat Jelata*, Yogyakarta: Cindebooks, 2012

Kurnadi Shahab, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007

Mgr. Edmund Woga, CSSR, *Misi Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2009

Rr.Huub J.W.M. Boelaars, dalam R. Hadawiryana (ed.), *Indonesasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia* Yogyakarta: Kanisius, 2005

Romo Gregorius Utomo, Pr."Deklarasi Ganjuran, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lestari", Bahan materi *Seminar* (Sragen, 21 Oktober 2009).

Sajogyo, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982

Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Penguasaan Pola Tanah Di Jawa Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Soekarwi, "Beberapa Perubahan Mendasar Pasca Swasembada Beras", dalam *Prisma* (No.5, 1993), hlm. 25-30.

Suhartono W. Pranoto, *Serpihan Budaya Feodal*, Yogyakarta: Agastya Media, 2001

Wawancara/Sumber lisan:

Yuni, Wawancara di Sidomulyo , 6 Agustus 2016.

Wakijo, wawancara di Sumbermulyo pada 24 Mei 2015 .

Internet

History of Federation of Asian Bishop's Conferences, <http://www.fabc.org/about.html>, diakses 20 July 2016, pukul.01.00.

Yogyakarta 25 Oktober 2016

Pembimbing



Ririn Datini, M.Hum
NIP.19741118 199903 2001

Reviewer



Mudji Hartono, M.Hum
NIP.19550115 198403 1001